

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

Jennifer Elisabeth Kamisopa
NPP.30.1483

*Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan
MasyarakatEmail:jekamisopa05@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Umar Nain, S.Sos,M.Si

ABSTRACT

Problem or Background (GAP): The empowerment of fishermen communities in Nabire Regency carried out by the Department of Fisheries and Marine Affairs of Nabire Regency through the Institutional Strengthening and Capital Assistance Program for fishermen communities in Nabire faces issues caused by uneven distribution of capital assistance and the inadequate formation of fishermen institutions. These issues result in barriers to the distribution of assistance, including capital, uneven infrastructure, and the lack of socialization and training for fishermen communities to improve their economic income. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze the implementation of the empowerment of fishermen communities in Nabire Regency through the Institutional Strengthening and Capital Assistance Program for fishermen and to identify the inhibiting factors in the field and suggest possible solutions to overcome these obstacles. **Method:** The research is conducted using a descriptive method with a qualitative approach. Data collection is done through interviews, observations, and documentation, as well as reviewing relevant literature and information from local government informants. This study adopts the empowerment theory by Totok Mardikanto, which includes four dimensions: human development, environmental development, institutional development, and enterprise development. **Results:** The research indicates that the empowerment of fishermen communities in Nabire Regency still faces several challenges. There are barriers related to the institutional constraints based on ethnicity, lack of advanced human resources, weak institutional frameworks for fishermen, hindered capital distribution, and the absence of renovations in supporting facilities and infrastructure for the empowerment of coastal fishermen communities in Nabire Regency. **Conclusion:** The institutional strengthening and capital assistance for the empowerment of fishermen communities in Nabire Regency are not yet optimal and still face inhibiting factors. This is evident from the lack of intensive counseling and training activities.

Keywords: Fishermen, Empowerment, Fishermen's economic development

ABSTRAK

Permasalahan atau Latar Belakang (GAP): Pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire melalui program Penguatan Kelembagaan dan Permodalan masyarakat nelayan di Nabire mengalami permasalahan yang disebabkan oleh belum meratanya penyaluran bantuan modal dan juga kelembagaan nelayan yang belum terbentuk dengan baik sehingga munculah hambatan terhadap penyaluran bantuan baik dari modal, sarana prasarana yang belum merata hingga sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonominya. **Tujuan :** maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire berlangsung dengan adanya program Penguatan Kelembagaan dan Permodalan bagi nelayan dan turut menganalisis faktor penghambat yang terjadi di lapangan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode :** penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta ditinjau dari beberapa literatur dan informan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh totok mardikanto dengan 4 dimensi yaitu bina manusia, bina lingkungan, bina kelembagaan dan bina usaha. **Hasil atau temuan :** Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan yang ada di kabupaten Nabire dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang masih dihadapi. Terdapat hambatan yang dihadapi pada kendala kelembagaan nelayan berdasarkan etnis, kurangnya sumber daya manusia yang maju, sendi – sendi kelembagaan nelayan yang belum kuat, penyaluran modal yang masih terhambat, serta belum adanya renovasi terhadap sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Nabire. **Kesimpulan :** Penguatan kelembagaan dan permodalan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire belum optimal dan masih ditemukan factor pengambat di dalamnya. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya penyuluhan dan pelatihan yang intensif.

Kata kunci : Nelayan, Pemberdayaan, Mengangkat perekonomian nelayan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pemerintah untuk mengangkat perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire didukung dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire Pasal 4 huruf D pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten; pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Suharto, 2018) Lokasi Kabupaten Nabire yang berada persis di tengah Teluk Cendrawasih Papua menjadikan mayoritas penduduk yang mendiami

wilayah pesisir mengambil nelayan sebagai mata pencaharian utama.. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire selaku penentu Kebijakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, melalui peraturan tersebut mendirikan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dikarenakan mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan menjadi mata pencaharian utama dengan *income* terbanyak ke – 2 setelah pertambangan emas di Kabupaten nabire.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire pada tahun 2017 telah mengadakan suatu program yakni Penguatan Kelembagaan dan Permodalan nelayan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat nelayan Kabupaten Nabire baik Orang Asli Papua (OAP) atau penduduk asli Papua, maupun Non OAP atau penduduk yang bukan berasal dari papua/pendatang. Tujuan diadakan program Penguatan Kelembagaan dan permodalan ialah untuk membantu masyarakat nelayan meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan ekonominya. Kelembagaan yang dibentuk nantinya akan menjadi suatu wadah agar mempermudah pemerintah Kabupaten dalam penyaluran modal, dan pengawasan dalam pemberdayaan nelayan Kabupaten Nabire. Permodalan yang menjadi bagian dari program setelah disalurkan diharapkan digunakan oleh kelompok nelayan untuk *mengupgrade* dan memenuhi kebutuhan akan pembelian sarana dan prasarana yang menunjang mata pencahariannya.

Namun meskipun telah diadakannya program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire, masih terdapat beberapa nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tersebar di beberapa distrik di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itulah pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan kembali dikuatkan dengan adanya penguatan kelembagaan nelayan dan penyaluran modal. Namun pada saat pandemik Covid – 19 pada tahun 2019, program pemberdayaan yang dilakukan terhambat sehingga mengakibatkan penurunan dalam proses pencaharian nelayan hingga pengelolaan hasil tangkap yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan status nelayan miskin di Kabupaten Nabire.

Namun setelah menurunnya pandemik Covid – 19, proses pemberdayaan nelayan melalui program yang telah dibuat pada tahun 2017 dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaan tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat di dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan pemberdayaan kembali dalam sistem yang ada di Kabupaten Nabire baik dari pemerintah sebagai penentu kebijakan maupun masyarakat nelayan sebagai bagian dari penduduk Kabupaten Nabire dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan dan tercapai peningkatan ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Permasalahan yang berkesinambungan dengan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Nabire berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jika dilihat dari

kondisi alam tentunya sangat mendukung. Lokasi Kabupaten Nabire yang strategis berada di tengah Teluk Cendrawasih dengan kekayaan biota laut yang melimpah menjadi suatu faktor pendukung yang baik jika dikelola dengan baik pula. Selain itu dinas yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah juga telah didirikan yakni Dinas Perikanan dan kelautan. Dalam pelaksanaannya, fugsi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penyedia layanan sudah berjalan cukup optimal, namun terdapat beberapa masalah internal dari masyarakat nelayan itu sendiri. Kuatnya sistem kekeluargaan yang dipegang teguh oleh kelompok nelayan itu sendiri atau dapat disebut bekerja dalam kelompok keluarga menjadikan sulitnya pemerintah untuk mengatur berjalannya program pemberdayaan yang ada di Kabupaten Nabire. Selain itu revitalisasi sarana dan prasarana penunjang yang belum maksimal mengakibatkan terhambatnya proses pemberdayaan nelayan dalam memenuhi kebutuhannya. Perhatian dari pemerintah yang kurang dan sosialisasi yang terbatas juga menjadi suatu hambatan dalam berjalannya proses pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian dari Bagong Suyanto (2011), Mekanisme *survival*, identifikasi kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat nelayan miskin dalam masa kritis akibat kenaikan harga bahan bakar minyak di pesisir Provinsi Jawa Timur menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil Pemberdayaan terhadap nelayan tradisional tidak serta merta langsung dapat berjalan sesuai. Karena pemahaman nelayan masih banyak yang kurang jika dilakukan dengan pendekatan *top-down*. Masyarakat nelayan juga dibantu agar dapat menyesuaikan diri dengan modernisasi yang ada bukan hanya dengan bantuan modal usaha tetapi juga diperlukannya pelatihan untuk memberikan bekal kepada masyarakat nelayan pesisir Provinsi Jawa Timur agar dapat mengelola produk – produk alternative hasil olahan lebih tahan lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi kekurangan hasil laut yang dikarenakan penangkapan berlebihan. In Indiarti (2015), Penelitian model peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan berkelanjutan di Desa Muara Kabupaten Jepara menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan hasil Jika nelayan bersatu dan memiliki kerja sama koperasi dalam suatu lembaga maka nelayan dapat mencapai skala ekonomi dan penguatan daya tawar di pasar. Koperasi merupakan output fungsi pekayanan dan aspek kewirausahawan dan trrcapainya skala kegiatan ekonomis oleh koperasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada

Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Penguatan kelembagaan dan permodalan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan untuk mengetahui bagaimana cara pemberdayaan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah serta mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Kepala Bidang Usaha Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire, Kepala Seksi Bina Usaha Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire, Kepala Distrik Nabire, Makimi, Ketua Kelompok Nelayan di Kabupaten Nabire, dan Nelayan di Kabupaten Nabire.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah menggunakan teori pemberdayaan dari Totok Mardikanto (2018) meliputi 4 dimensi dalam mengukur pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire yaitu Pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan nelayan pesisir,

dan pelestarian lingkungan sekitar. Adapun Pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1 Pembinaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire oleh dimensi pembinaan sumber daya manusia dengan indikator tingkat pendidikan dan berapa lama menjalani pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire. Pengelolaan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire selama ini belum berjalan optimal pada kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire dikarenakan masih adanya faktor penghambat. Seharusnya kendala seperti terhambatnya pendataan standar tingkat pendidikan dapat diatasi dengan adanya pendataan keluarga nelayan dan masyarakat sekitar.

3.2 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Pesisir

Keterlibatan Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penyedia layanan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nabire dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional sehingga terciptanya kelembagaan yang diinginkan oleh Dinas Perikanan kepada masyarakat. Kelembagaan yang masuk dalam program yang diberikan oleh pemerintah, dapat dijadikan sebagai tempat penyaluran modal dan kontrol. Kemudian, pembinaan dalam kelembagaan nelayan ini juga bisa dijadikan sebagai kelompok kerja agar tercapainya efisiensi kerja.

3.3 Pelestarian Lingkungan Sekitar

Bina Lingkungan ialah dengan adanya konservasi alam yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang diberikan dan dilaksanakan oleh masyarakat nelayan. Dinas Perikanan dan Kelautan juga membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat nelayan diharapkan saling menjaga kebersihan di sekitar pesisir Kabupaten Nabire serta rumah apung sebagai budidaya bibit ikan.

3.4 Diskusi Utama Penelitian

Penulis menemukan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire belum berhasil secara komprehensif menjalankan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dalam upaya peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan Kabupaten Nabire. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagong Suyanto (2011) menunjukkan hasil bahwa pemberdayaan yang akan dilakukan kepada masyarakat nelayan yang hidup tradisional tidak serta – merta berjalan sesuai. Masyarakat nelayan juga perlu untuk berkembang sesuai zaman dan mengikuti modernisasi ,sedangkan penelitian ini

memfokuskan pada upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memaksimalkan potensi Teluk Cendrawasih sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkap nelayan Kabupaten Nabire agar tercapai peningkatan ekonomi dan tercukupinya pemenuhan ekonomi . Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iin Indiarti (2015), penelitian ini juga menemukan bahwa dalam bekerja, sebaiknya nelayan berjalan dalam kelompok dan kesatuan agar dapat saling bekerja sama.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yaitu belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut dimulai dari pemberdayaan sumber daya, manusia yang masih kurang, pembinaan kelembagaan yang belum merata dan berjalan secara maksimal, pembinaan usaha masyarakat yang masih terhambat dan pelestarian lingkungan sekitar. Dalam Penelitian ini penulis mengharapkan adanya perbaikan tatanan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Nabire sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori pemberdayaan Totok Mardikanto (2018)

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire beserta jajarannya, serta kelompok nelayan Kabupaten Nabire yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Suharto. (2018). A.6. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)*, 49.

Suyanto, & Bagong. (2011). Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM. *JURNAL UNAIR*, 75-76.

in, I. (2015). Penelitian Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 1-13.

Mardikanto, T. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik. In P. S. Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik* (pp. 113-117). Bandung: Alfabeta.



